



Rancangan Akhir
RENJA TAHUN 2022

Inspektorat Sidoarjo
Where the accountability began 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan, kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan dokumen Renja tahun berikutnya.

Sidoarjo, Agustus 2021

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	46
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V : PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

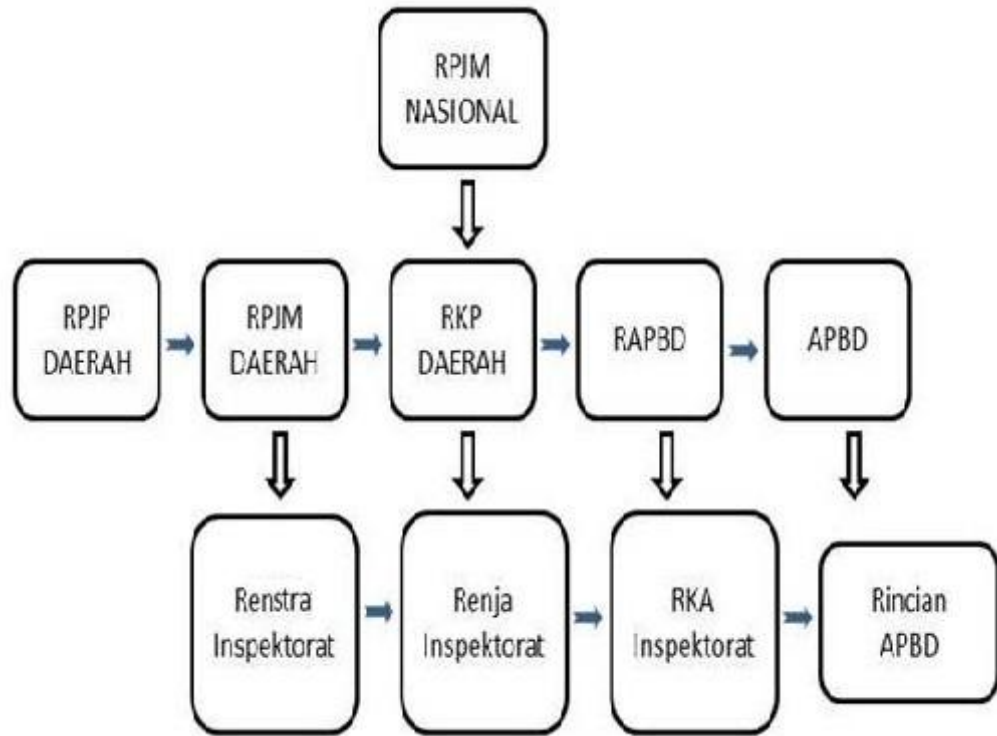
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Pada Renja OPD bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta rancangan Reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya dilakukan penyusunan rincian rencana APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD.

Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.



Kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja OPD ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah:

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022*

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;

18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- 1) Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;

- 2) Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2022 ini Inspektorat Daerah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

✓ Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- ✓ Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- ✓ Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2022.
- ✓ Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Daerah Sidoarjo Tahun 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat Daerah

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Tahun 2022 beserta Rencana Penganggarannya.

Bab V. Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tigapuluhenam) sub kegiatan dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program:

- Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran.
- Nilai SKM Perangkat Daerah.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan.
- Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

- 1.1. Subkegiatan jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 35.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 71,42% yaitu dari target 7 (tujuh) dokumen perencanaan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 5 (lima) dokumen perencanaan, antara lain:
 - a. Dokumen Reviu Renstra tahun 2021.
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021.
 - c. Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu tahun 2021.
 - d. Dokumen Rencana Aksi tahun 2021.
 - e. Dokumen Rencana Kejra tahun 2022.

1.2. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 68,45% yaitu dari target dana sebesar Rp 2.077.549,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 1.422.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 2 (dua) dokumen laporan kinerja terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 2 (dua) dokumen laporan kinerja, antara lain:
 - a. LAKIP Inspektorat tahun 2020.
 - b. LPPD Inspektorat tahun 2020.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase realisasi anggaran PD.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 46,65% yaitu dari target dana sebesar Rp 12.729.383.106,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 5.937.725.582,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 60 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 60 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

2.2. Subkegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah jam kerja lembur.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 3.975.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 50 jam kerja lembur terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 jam kerja lembur.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran.

Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:

3.1. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah surat keluar masuk yang dikelola.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 17,48% yaitu dari target dana sebesar Rp 2.500.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 437.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 50% yaitu dari target 2500 surat keluar masuk yang dikelola terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 1250 surat keluar masuk yang dikelola.

3.2. Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Indikator subkegiatan:

- Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 30,28% yaitu dari target dana sebesar Rp 193.200.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 58.500.351,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 50% yaitu dari target 12 rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 6 rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar.

3.3. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar.
- Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar.
- Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar.
- Jumlah tenaga non ASN yang terbayar.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 36,96 % yaitu dari target dana sebesar Rp 821.320.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 303.581.740,00.

- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 5 (lima) tenaga kebersihan kantor yang terbayar terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 5 (lima) tenaga kebersihan kantor yang terbayar.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 4 (empat) tenaga keamanan kantor yang terbayar terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4 (empat) tenaga keamanan kantor yang terbayar.
 - c. Tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 14 pengelola keuangan dan barang yang terbayar terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 14 pengelola keuangan dan barang yang terbayar.
 - d. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) tenaga non ASN yang terbayar terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) tenaga non ASN yang terbayar.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum kantor.

Terdiri dari 9 (sembilan) subkegiatan, antara lain:

4.1. Subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dana sebesar Rp 8.910.661,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 8.910.500,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 236 komponen listrik /penerangan yang tersedia

teralisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 236 komponen listrik /penerangan yang tersedia.

4.2. Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 32,77% yaitu dari target dana sebesar Rp 28.312.465,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 9.278.600,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 47,24% yaitu dari target 10.245 cetak dan penggandaan yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4.840 cetak dan penggandaan yang tersedia.

4.3. Subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah BBM yang disediakan.
- Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 32,77% yaitu dari target dana sebesar Rp 28.312.465,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 9.278.600,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 55,57% yaitu dari target 15.000 liter BBM yang disediakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 8.336 liter BBM yang disediakan.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) logistik rumah tangga kantor yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) logistik rumah tangga kantor yang tersedia.

4.4. Subkegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 41,22% yaitu dari target dana sebesar Rp 10.440.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 4.303.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 50% yaitu dari target 1.932 buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 966 buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia.

4.5. Subkegiatan fasilitasi kunjungan tamu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan.
- Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 49,45% yaitu dari target dana sebesar Rp 265.495.550,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 131.296.240,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 42,78% yaitu dari target 4.850 jamuan rapat/tamu yang disediakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 2.075 jamuan rapat/tamu yang disediakan.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 53,33% yaitu dari target 225 kunjungan tamu yang difasilitasi terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 120 kunjungan tamu yang difasilitasi.

4.6. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator subkegiatan:

- Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti.
- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 30,02% yaitu dari target dana sebesar Rp 656.224.630,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 196.994.500,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 100% surat perintah tugas yang ditindaklanjuti terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 100% surat perintah tugas yang ditindaklanjuti.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 55% yaitu dari target 10 rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 11 rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan.

4.7. Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 63,90% yaitu dari target dana sebesar Rp 42.861.910,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 27.390.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 83,98% yaitu dari target 2.185 alat tulis kantor yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 1.835 alat tulis kantor yang tersedia.

4.8. Subkegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 94,03% yaitu dari target dana sebesar Rp 10.661.047,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 10.025.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 178 peralatan rumah tangga yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 178 peralatan rumah tangga yang tersedia.

4.9. Subkegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah arsip dinamis yang dikelola.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 10.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 53% yaitu dari target 1.500 arsip dinamis yang dikelola terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 795 arsip dinamis yang dikelola.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah dan jenis BMD yang diadakan.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

5.1. Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 29,66% yaitu dari target dana sebesar Rp 398.195.474,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 118.093.000,00.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 39,39% yaitu dari target 33 peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 13 peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan.

5.2. Subkegiatan pengadaan mebel.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah meubelair yang diadakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 48,72% yaitu dari target dana sebesar Rp 91.045.845,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 44.353.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 75% yaitu dari target 40 meubelair yang diadakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 30 meubelair yang diadakan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan.

Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:

6.1. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 10.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 (satu) kendaraan jabatan yang dipelihara terealisasi sampai dengan

bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) kendaraan jabatan yang dipelihara.

- b. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 (satu) STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya.

6.2. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.
- Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia.
- Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang lunas pajaknya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 7,60% yaitu dari target dana sebesar Rp 160.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 12.165.497,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 61,53% yaitu dari target 13 kendaraan dinas/operasional yang dipelihara terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 8 (delapan) kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia.
 - c. Tercapai kinerja output sebesar 15,38% yaitu dari target 13 STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang lunas pajaknya terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 2 (dua) STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang lunas pajaknya.

6.3. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 27,38% yaitu dari target dana sebesar Rp 147.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 40.247.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 25 peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang diadakan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 25 peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

6.4. Subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 88,95% yaitu dari target dana sebesar Rp 211.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 187.686.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 500 m² luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 500 m² luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi.

7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase ASN yang disiplin.
- Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat.

Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

7.1. Subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 24,21% yaitu dari target dana sebesar Rp 208.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 50.350.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 101,66% yaitu dari target 60 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 61 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program:

- Persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara.
- Persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara.
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti.
- Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B.
- Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti.

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang disusun.

Terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, antara lain:

1.1. Subkegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja OPD yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 20,21% yaitu dari target dana sebesar Rp 102.680.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 20.750.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 44,11% yaitu dari target 34 laporan hasil pengawasan internal yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 15 laporan hasil pengawasan internal yang disusun.

1.2. Subkegiatan reviu laporan kinerja.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil review kinerja yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 55,90% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.099.300,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 5.086.800,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 6 laporan hasil review kinerja yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 6 laporan hasil review kinerja yang disusun.

1.3. Subkegiatan reviu laporan keuangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil review keuangan yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 54,59% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.709.525,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 5.300.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 0 laporan hasil review keuangan yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 laporan hasil review keuangan yang disusun.

1.4. Subkegiatan pengawasan desa.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 62,21% yaitu dari target dana sebesar Rp 59.895.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 37.260.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 53,84% yaitu dari target 52 laporan hasil pengawasan desa yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 28 laporan hasil pengawasan desa yang disusun.

1.5. Subkegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 6,34% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.440.850,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 598.200,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 133,33% yaitu dari target 3 (tiga) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4 (empat) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 133,33% yaitu dari target 3 (tiga) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi APIP terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4 (empat) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi APIP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Indikator subkegiatan:

- Persentase penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 17,77% yaitu dari target dana sebesar Rp 112.550.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 50% yaitu dari target 100% penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 50% penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

2.2. Subkegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 18,51% yaitu dari target dana sebesar Rp 184.800.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 34.200.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 38,59% yaitu dari target 57 laporan hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 22 laporan hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu yang disusun.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi

Indikator program:

- Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal Terdefinisi.

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.

Indikator kegiatan:

- Jumlah kebijakan yang ditetapkan.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

1.1. Subkegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 132,66% yaitu dari target dana sebesar Rp 63.437.500,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 84.155.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 177,77% yaitu dari target 9 (sembilan) kebijakan yang ditetapkan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 16 kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Subkegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang ditetapkan.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 5.497,26% yaitu dari target dana sebesar Rp 1.187.500,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 65.280.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 800% yaitu dari target 1 (satu) kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang ditetapkan terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 8 (delapan) kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang ditetapkan.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.

Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 158.860.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 25% yaitu dari target 8 (delapan) laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 2 (dua) laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang disusun.

2.2. Subkegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi yang disusun.
- Jumlah laporan hasil verifikasi reformasi birokrasi yang disusun.
- Jumlah laporan hasil penilaian reformasi birokrasi yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 61,21% yaitu dari target dana sebesar Rp 22.585.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 13.825.000,00.

- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 4 (empat) laporan hasil pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4 (empat) laporan hasil pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi yang disusun.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 50% yaitu dari target 20 laporan hasil verifikasi reformasi birokrasi yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 10 laporan hasil verifikasi reformasi birokrasi yang disusun.
 - c. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 48 laporan hasil penilaian reformasi birokrasi yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) laporan hasil penilaian reformasi birokrasi yang disusun.

2.3. Subkegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.
- Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 25,16% yaitu dari target dana sebesar Rp 252.310.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 63.480.000,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 42,85% yaitu dari target 7 (tujuh) laporan hasil koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 3 (tiga) laporan hasil koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.

- b. Tercapai kinerja output sebesar 57,14% yaitu dari target 7 (tujuh) laporan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4 (empat) laporan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.

2.4. Subkegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi penegakan integritas yang disusun.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana sebesar Rp 175.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, telah tercapai output sebagai berikut:
 - a. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1 (satu) laporan hasil pendampingan dan asistensi penegakan integritas yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) laporan hasil pendampingan dan asistensi penegakan integritas yang disusun.
 - b. Tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) laporan hasil verifikasi penegakan integritas yang disusun terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0 (nol) laporan hasil verifikasi penegakan integritas yang disusun.

HASIL CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2021

1. Pencapaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target s/d Triwulan 2	Realisasi s/d Triwulan 2	Capaian Kinerja s/d Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	0%	0%	0%	100%	0%
	2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0%	0%	0%	2,08%	0%
	3. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo sampai tingkat terdefinisi	0%	0%	0%	Terdefinisi	0%
	4. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0%	0%	0%	0,31%	0%
	5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98% (27 rekom)	100% (28 rekom)	102,04% (28 rekom)	98%	102,04% (28 rekom)
	6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	78% (28 rekom)	100% (36 rekom)	128,20% (36 rekom)	78%	128,20% (36 rekom)

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022*

	Sidoarjo yang ditindaklanjuti					
	7. Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100% (24 Pengaduan / Kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	100%	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)

2. Pencapaian Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja program	Target s/d Triwulan 2	Realisasi s/d Triwulan 2	Capaian Kinerja s/d Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%	0%	0%	95%	0%
		Nilai SKM Perangkat Daerah	0%	0%	0%	89	0%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0%	0%	0%	A	0%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%	0%	0%	2,08%	0%
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%	0%	0%	0,31%	0%

	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98% (27 rekom)	100% (28 rekom)	102,04% (28 rekom)	98%	102,04% (28 rekom)
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100% (24 Pengaduan / Kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	100%	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)
	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	0%	0%	0%	100%	0%
	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	100%	0%

3. Pencapaian Kinerja Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target kinerja s/d Triwulan 2	Realisasi kinerja s/d Triwulan 2	Capaian kinerja s/d Triwulan 2	Target kinerja Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4	4	100%	4	100%
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	0	0	0%	0	0%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	0%	0%	0%	80%	0%
3.	Penyediaan Jasa	Persentase terpenuhinya jasa	50%	50%	100%	100%	50%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang perkantoran					
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum kantor	0%	0%	0%	100%	0%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	43	43	100%	73	58,90%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	33	33	100%	39	84,61%
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	0%	0%	0%	80%	0%
		Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	0%	0%	0%	75%	0%
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang disusun	57	57	100%	98	58,16%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun	8	8	100%	61	13,11%
10.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan yang ditetapkan	16	16	100%	9	177,77%

11.	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	5	6	120%	5	120%
-----	----------------------------	--	---	---	------	---	------

4. Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan II

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s/d Triwulan 2	Realisasi s/d Triwulan 2	Capaian Kinerja s/d Triwulan 2	Alasan ketidak tercapaian
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.077.549,00	1.557.940,00	1.422.000,00	91,27%	Sesuai dengan kebutuhan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.733.358.106,00	6.859.799.114,00	5.937.725.582,00	86,56%	Sesuai dengan kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.020.000,00	437.414.000,00	362.519.091,00	82,88%	Sesuai dengan kebutuhan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.312.906.263,00	740.148.921,00	465.461.195,00	62,89%	PPKM, turun ke desa & OPD dibatasi
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	489.241.319,00	224.554.680,00	162.446.000,00	72,34%	Sesuai dengan kebutuhan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.000.000,00	362.750.000,00	240.098.497,00	66,19%	Sudah diPAK
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.000.000,00	70.750.000,00	50.350.000,00	71,17%	Sesuai dengan kebutuhan

8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	190.824.675,00	144.692.975,00	68.995.000,00	47,68%	PPKM, kegiatan dilaksanakan secara daring, anggaran mamin tidak dapat diserap
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	297.350.000,00	133.250.000,00	54.200.000,00	40,68%	Kegiatan tim monev pembangunan daerah belum bisa dilaksanakan
10.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	63.437.500,00	97.480.000,00	84.155.000,00	86,33%	Sesuai dengan kebutuhan
11.	Pendampingan dan Asistensi	608.755.000,00	132.917.500,00	77.305.000,00	58,16%	Kegiatan belum dilaksanakan, menunggu jadwal dari KPK

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindaklanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

➤ Perkembangan/tren capaian kinerja:

1. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2021 (s/d Triwulan 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	0%	0%
	2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	2,08%	0%	0%
	3. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo sampai tingkat terdefinisi	Terdefinisi	0%	0%
	4. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0,31%	0%	0%

	5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	98%	100% (28 rekom)	102,04% (28 rekom)
	6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	78%	100% (36 rekom)	128,20% (36 rekom)
	7. Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100%	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)

2. Tabel Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 (s/d Triwulan 2)

Sasaran Strategis / indikator sasaran strategis	Realisasi capaian Tahun 2020	Realisasi capaian Tahun 2021	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			
1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (48/48 OPD)	0%	Proses pencapaian
2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	-	0%	Proses pencapaian
3. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal tingkat terdefinisi	terdefinisi (skor 3,09)	0%	Proses pencapaian

4. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	-	0%	Proses pencapaian
5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17% (930/930 rekom)	100% (28 rekom)	Proses pencapaian
6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	75% (123/164 rekomendasi)	100% (36 rekom)	Proses pencapaian
7. Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100% (144/144 kasus)	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	Proses pencapaian

3. Tabel Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 (s/d Triwulan 2) dengan Target Tahun 2021

Sasaran Strategis / indikator sasaran strategis	Realisasi Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2021	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			
1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	0%	100%	Proses Pencapaian
2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0%	2,08%	Proses Pencapaian
3. Tingkat Maturitas SPIP kabupaten Sidoarjo minimal tingkat terdefinisi	0%	Terdefinisi	Proses Pencapaian
4. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian	0%	0,31%	Proses Pencapaian

keuangan Negara			
5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% (28 rekom)	98%	Proses Pencapaian
6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	100% (36 rekom)	78%	Proses Pencapaian
7. Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	100%	Proses Pencapaian

4. Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis / indikator sasaran strategis	Realisasi Tahun 2021 (tw.II)	Standar Nasional Tahun 2021	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			
1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	0%	-	-
2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0%	-	-
3. Tingkat Maturitas SPIP kabupaten Sidoarjo minimal tingkat terdefinisi	0%	-	-
4. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	0%	-	-
5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	-	-

	(28 rekom)		
6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	100% (36 rekom)	-	-
7. Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	95,83% (23 Pengaduan / Kasus)	-	-

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah :

- 1) Jumlah SDM Aparat Pengawas masih belum seimbang dibanding dengan jumlah Obrik (Obyek Pemeriksaan) yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan, terutama pemeriksaan proyek pekerjaan umum;
- 3) Kapabilitas SDM perlu ditingkatkan lagi;
- 4) Masih banyak obyek pemeriksaan yang beresiko tinggi terjadi penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 5) Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat OPD;

Dari permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut :

- 1) Jika kuantitas SDM Aparat Pengawas bertambah maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan lebih maksimal;
- 2) Jika dana operasional dan sarana kerja memadai maka proses pemeriksaan dan pengawasan akan lebih lancar dan optimal;
- 3) Jika kemampuan aparat pengawas ditingkatkan maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih optimal dan profesional;
- 4) Perlu adanya analisis yang lebih mendalam terhadap obyek pemeriksaan yang berpeluang/beresiko tinggi terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;
- 5) Jika Inspektorat Daerah sebagai OPD pembina SPIP melaksanakan fungsinya secara intensif sebagaimana yang telah ditentukan, maka implementasi SPIP di tingkat OPD akan berjalan optimal.

2.3.1. Kelemahan Dan Kekuatan Internal

Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

A. Kelemahan

1. Jumlah SDM Aparat Pengawas yang masih belum seimbang dibanding dengan jumlah Obrik (obyek pemeriksaan) yang ada di Kabupaten Sidoarjo;

2. Kemampuan Aparat Pengawasan yang tidak merata;
3. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan yang ada saat ini belum memadai.

B. Kekuatan

1. Adanya dukungan pimpinan daerah;
2. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
3. Adanya kewenangan yang jelas;
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

2.3.2. Peluang dan Tantangan External

Adapun Peluang dan Tantangan External Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

A. Peluang

1. Adanya kesempatan meningkatkan kinerja pengawasan sesuai dengan perubahan kelembagaan
2. Adanya kesempatan meningkatkan SDM aparat pemeriksaan melalui pendidikan fungsional pengawasan

B. Tantangan

1. Apabila terjadi mutasi pegawai yang telah mendapatkan sertifikat pengawasan sedang penggantinya belum siap dengan tugas baru;
2. Regulasi berubah-ubah;
3. Adanya isu KKN, selaku APIP yang menjadi obrik adalah kolega sendiri.

Faktor-faktor sebagai penentu keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia (personil) yang profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerja instansi.

4. Pemantauan/monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang direncanakan terutama pada obyek pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan.
5. Hasil evaluasi program pengawasan selalu digunakan sebagai bahan perbandingan perencanaan program pengawasan tahun berikutnya
6. Hasil tindak lanjut pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Program dan 22 (duapuluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016.
2. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017.
3. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018.
4. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2019.
5. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2020.

6. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah 6 (enam) program terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan, sedangkan pada tahun 2017 hanya 5 (lima) program terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan, pada tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) program 18 kegiatan, pada tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) program 6 (enam) kegiatan, pada tahun 2020 terdiri dari 3 (tiga) program 11 kegiatan serta 36 subkegiatan, dan pada tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) program 11 kegiatan serta 36 subkegiatan. Pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 terdapat perbedaan, sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2016 ada tambahan 2 (dua) kegiatan yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertambah 1 kegiatan (Penyediaan jasa surat menyurat), pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan berubah menjadi pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya
- ✓ Tahun 2017 berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya;
- ✓ Tahun 2018, berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan dan capaian kinerja;
- ✓ Pada Tahun 2019 dilakukan perampingan program dan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 6 kegiatan;
- ✓ Pada Tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan; bertambah 1 (satu) program dari tahun 2019 yang nomenklaturnya disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.
- ✓ Pada Tahun 2021 melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan; yang nomenklaturnya disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional, antara lain :

- 1) Penguatan ketahanan ekonomi;
- 2) pengembangan wilayah;
- 3) peningkatan SDM;
- 4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) penguatan infrastruktur;
- 6) pembangunan lingkungan hidup;
- 7) stabilitas politik, budaya, pertahanan, keamanan (polbudhankam) dan transformasi pelayanan publik,

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu “mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang berisikan 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp 5 Juta - Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan dan kader Posyandu
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorier
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat

16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

a. Tujuan Renja Inspektorat

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

b. Sasaran Renja Inspektorat

Terlaksananya Pengawasan yang Efektif.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 2 (dua) program sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.4.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program penyelenggaraan pengawasan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

2.1.2. Reviu Laporan Kinerja;

2.1.3. Reviu Laporan Keuangan;

2.1.4. Pengawasan Desa;

2.1.5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

1.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2022 akan mengoptimalkan sistem pengawasan internal dengan 38 jenis pengawasan untuk mendukung terwujudnya 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang tertuang pada RKPD tahun 2021. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berikut ini disajikan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2022 :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.604.697.684
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.145.260
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.745.260
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.869.147.022
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.866.472.022
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.675.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.400.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.311.124.168
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.560.258
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.807.734
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.595.039
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.778.710
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.804.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	275.621.050
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667.957.377
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.480.480
	Pengadaan Mebel	125.618.900
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	512.861.580
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.799.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844.799.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.601.554

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.282.847
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.818.707
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.394.191.900
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	604.571.900
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	222.160.000
	Reviu Laporan Kinerja	30.812.500
	Reviu Laporan Keuangan	151.876.900
	Pengawasan Desa	122.550.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	77.172.500
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	789.620.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	180.750.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	608.870.000
	JUMLAH	17.998.889.584

BAB V

PENUTUP

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Awal RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.